

ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN TERKAIT PENERAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 – 2032

Analysis of Land Use Related to the Implementation of the Regional Spatial Planning (RTRW) of Palopo City 2012-2032

Hariyanti Karim¹⁾, Abdul Malik²⁾, dan Rosmini Maru²⁾

¹⁾ Program Pascasarjana Pendidikan Geografi / Universitas Negeri Makassar

hariyanthi17@gmail.com

²⁾ Dosen Program Pascasarjana Pendidikan Geografi / Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

The existence of a limited space requires the community to better understand the importance of the development of spatial planning to make a realization of a safe, comfortable, productive, and sustainable space. The study aims at analyzing the utilization of the existing land in Palopo city and the incompatibility of utilizing the existing land in Palopo city on the spatial plan in Palopo city. This study employed descriptive research method. Data were collected by conducting spatial data process, overlay, and presentation of the result. The results of the study reveal that the utilization of the existing land in Palopo city consisted of nine types, namely settlements and places of activity, ponds, rivers, open land, rice fields, tegalan (fields), shrubs, mixed gardens, and forests and land use mismatches with the 2012-2032 RTRW are classified as low, amounting to 5,02% of the total area of Palopo City in the period of seven years from 2012-2019 or around 0,72% per year. If it is estimated that the non-conformity from 2012-2032 is 14,2%. While the mismatch of existing land use in 2019 with the revised 2012-2032 RTRW conducted in 2017 there is still a discrepancy of 0,77% of the total area. Potential impacts due to the incompatibility are it could trigger the conflict of utilizing the land, over support and over capacity of the land, and could give impact on the environment such as damage of decreasing quality of the natural environment, and impacting on the comfort and freshness of the city environment.

Keywords: *land use, spatial planning, incompatibility impact*

ABSTRAK

Keberadaan ruang yang terbatas menuntut masyarakat untuk lebih memahami tentang pentingnya perkembangan penataan ruang agar terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk itu dilakukan monitoring untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penggunaan lahan eksisting kota Palopo dan menganalisis ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting kota Palopo terhadap rencana pola ruang RTRW Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tahap pengumpulan data yaitu pengolahan data spasial, *overlay*, dan penyajian hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lahan eksisting di Kota Palopo terdiri dari sembilan jenis yaitu permukiman dan tempat kegiatan, tambak, sungai, lahan terbuka, sawah, tegalan/ladang, semak belukar, kebun campuran, dan hutan. Terjadi ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW 2012 – 2032 tergolong rendah yaitu sebesar 5,02% dari luas wilayah Kota Palopo dalam kurun waktu tujuh tahun dari tahun 2012-2019 atau sekitar 0,72% per tahunnya. Jika diperkirakan ketidaksesuaian dari

tahun 2012-2032 yaitu sebesar 14,2%. Sedangkan ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting 2019 dengan revisi RTRW 2012 – 2032 yang dilakukan pada tahun 2017 masih terdapat ketidaksesuaian sebesar 0,77 % dari luas wilayah. Potensi dampak yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian yaitu dapat menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, terlampauinya daya dukung dan daya tampung lahan, serta dapat berdampak terhadap lingkungan seperti menurunnya kualitas lingkungan alam, serta berdampak terhadap kenyamanan dan kesegaran lingkungan kota.

Kata Kunci: Penggunaan lahan, tata ruang, dampak ketidaksesuaian

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman penggunaan lahan juga semakin berubah. Setiap tahunnya kebutuhan ruang akan semakin meningkat hal ini, di pengaruhi jumlah penduduk yang semakin bertambah dan pembangunan terutama pada daerah yang memiliki potensi daerah yang banyak (Maulana, 2018), wilayah pemekaran (Tuni, 2013), dan wilayah yang terdapat perusahaan tambang (Gunawan dkk, 2010). Peningkatan kebutuhan lahan cenderung mempunyai konsekuensi merubah penggunaan suatu lahan menjadi kawasan yang terbangun (Sembel, 2010). Salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan yang baik yaitu dengan menata penggunaan lahan seoptimal mungkin sebagaimana yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (Rusdi dkk, 2017).

Penataan ruang berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia No.26 tahun 2007 pasal 2 menyatakan bahwa: “Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”.

Pemanfaatan ruang kota berubah dengan cepat mengarah pada pemanfaatan yang lebih menguntungkan secara ekonomi sehingga diperlukan adanya upaya untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang yang terarah dan

terkendali terhadap rencana tata ruang wilayah karena ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan (Purnamasari, 2015).

Faktor yang dominan mempengaruhi yaitu faktor penduduk dan permukiman. Dampak yang ditimbulkan jika terjadi penyimpangan yaitu penurunan kualitas ruang yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dan berisiko mengalami bencana yang muncul secara tak terduga (Khaerani, 2017). Umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang berawal dari kebijaksanaan pemerintah karena pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum benar-benar mengacu pada RTRW yang telah ditetapkan. Kurangnya koordinasi antar instansi serta belum adanya partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam melakukan rencana tata ruang menjadi penyebab kurang efektifnya rencana tata ruang (Sunardi, 2004).

Keberadaan ruang yang terbatas menuntut masyarakat untuk lebih memahami tentang pentingnya perkembangan penataan ruang agar terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk itu dilakukan monitoring untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan yang baik (Iskandar dkk,

2016). Pengetahuan tentang perubahan penggunaan lahan sangat penting untuk kegiatan perencanaan dan manajemen dalam pemanfaatan ruang dan waktu (Regmi dkk, 2017).

Perubahan penggunaan lahan menjadi isu yang sangat penting bagi perencanaan dan penyusunan kebijakan perkotaan dan wilayah (Wijaya, 2015). Hal tersebut tentunya memiliki konsekuensi pada tata ruang kota dan keselamatan bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan fungsi utama kawasannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan (Nurfalaq, 2017).

Kota Palopo memiliki pembangunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu yang mendorong pertumbuhan pemukiman menjadi lebih pesat (Nurfalaq, 2017). Maka dari itu untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pemanfaatan lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dibutuhkan perencanaan mengenai rencana tata ruang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang perencanaan tata ruang dan Perda Kota Palopo Nomor 9 tahun 2012 tentang RTRW Kota Palopo tahun 2012-2032 yang menyatakan bahwa: “Untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palopo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan negara, perlu disusun rencana tata ruang wilayah”.

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang ditujukan

sampai akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga dua puluh tahun mendatang dan ditinjau kembali setiap lima tahun (Penataan Ruang, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan lahan eksisting kota Palopo dan menganalisis ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting kota Palopo terhadap rencana pola ruang RTRW Kota Palopo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari data spasial (peta-peta), buku, jurnal, arsip, serta laporan penelitian. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data primer diperoleh dari hasil survei pengecekan lapangan jenis penggunaan lahan.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi. Menggunakan bantuan teknik sistem informasi geografis dan pengindraan jauh sebagai teknik untuk mengolah dan menganalisis data untuk membuktikan hasilnya akan dilakukan observasi serta dokumentasi untuk memvalidasi keadaan dilapangan.

Alat yang digunakan yaitu laptop, *Software* Microsoft office 2007, *Software* ArcGIS 10.2, GPS (*Global Position Sistem*), dan

kamera. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta penggunaan lahan, Citra satelit SPOT 6, Citra satelit Google Earth, dan peta pola ruang RTRW Kota Palopo tahun 2012-2032 dan peta revisi pola ruang RTRW Kota Palopo 2012-2032.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya tahapan pengolahan data spasial, pada tahap ini peta penggunaan lahan tahun 2017, citra satelit SPOT 6 dan Google Earth dijadikan sumber dalam pembuatan peta penggunaan lahan eksisting 2019 yang akan diuji kebenarannya. Hasil klasifikasi peta penggunaan lahan yang diketahui diuji kebenarannya melalui pengecekan langsung ke lapangan untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Lokasi pengecekan lapangan diambil minimal masing-masing 2 titik untuk mewakili masing-masing penggunaan lahan. GPS digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui posisi koordinat objek.

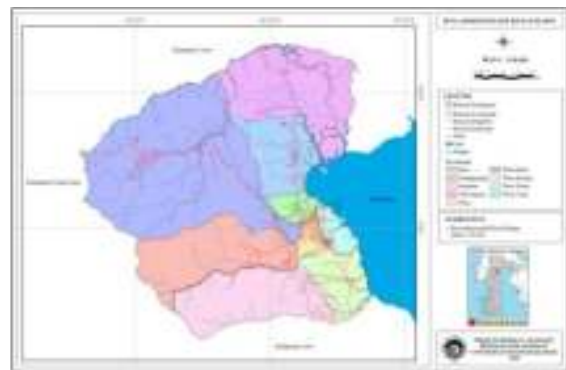
Tahap *Overlay*, peta penggunaan lahan eksisting tahun 2019 kemudian di *overlay* dengan peta rencana pola ruang RTRW. Berdasarkan hasil *overlay* akan di temukan lahan dengan konsisten I, konsisten II, dan Inkonsisten (ketidaksesuaian) dengan RTRW. Konsisten I merupakan kondisi penggunaan lahan sesuai dengan rencana pola ruang RTRW. Konsisten II merupakan kondisi penggunaan lahan sementara berbeda dengan peruntukannya tetapi termasuk konsisten karena berpotensi terjadi perubahan. Inkonsisten (ketidaksesuaian) merupakan kondisi penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan sulit atau hampir tidak dapat dikembalikan ke fungsi lahan semula (Purnamasari, 2015).

Tahap Penyajian Hasil, tahap penyajian hasil akan disajikan dalam bentuk laporan akhir yang menyangkut analisis penggunaan lahan terkait penerapan RTRW Kota Palopo.

HASIL

Deskripsi Lokasi Penelitian

Daerah penelitian terletak di Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan. Letak astronomis kota Palopo antara 2°53'15"– 3°04'08" LS dan 120°03'10"–120°14'34" BT. Secara geografis letak kota Palopo dapat di lihat dari batas – batas wilayahnya, yaitu : Sebelah timur: Teluk Bone, sebelah selatan: Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sebelah utara: Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, dan sebelah barat: Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara.



Gambar 1. Peta Administratif Lokasi Penelitian

Beriklim tropis basah dengan temperatur udara udara berkisar antara 25,5–27,9 °C dan kelembaban udara bervariasi berkisar antara 78,8%–85% tergantung lamanya penyinaran matahari. Curah hujan pada daerah dataran rendah bervariasi berkisar antara 500-1000 mm/tahun dan pada daerah pegunungan berkisar antara 1000–2000 mm/tahun.

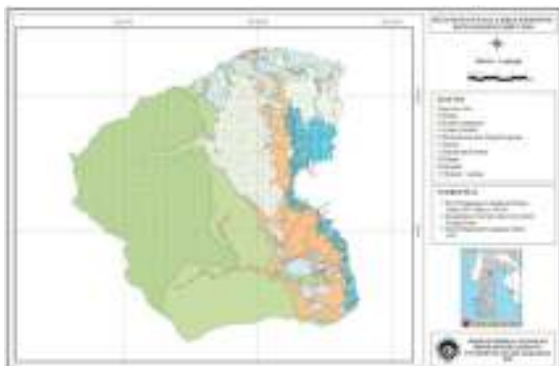
Jenis tanah di dominasi oleh Ovic distropepts, typic sulfaquepts, dan typic tropacuepts. Topografi kota Palopo berada pada ketinggian antara 0 - 1500 mdpl. Kemiringan

lereng kota Palopo mencapai 0 - > 40 % dari datar sampai sangat curam. Struktur batuan kota Palopo umumnya terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan beku yaitu batuan metamorf , batuan vulkanik, dan endapan alluvial. memiliki 6 (enam) wilayah DAS yaitu DAS Purangi, DAS Bua, DAS Songkamati, DAS Pacangkuda, DAS Boting, dan DAS Salubattang.

Jumlah penduduk kota Palopo pada akhir 2017 tercatat sebanyak 176.907 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu masing-masing 85.967 jiwa laki-laki dan 90.940 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 94,53. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Wara mencapai 3.332 jiwa/km² dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Mungkajang yaitu sebesar 147 jiwa/km².

Penggunana Lahan Eksisting 2019

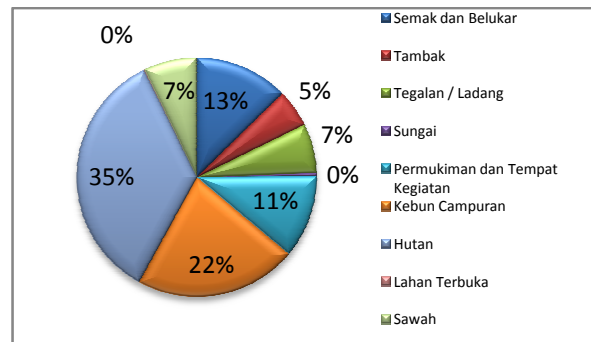
Penggunaan lahan di Kota Palopo berasal dari interpretasi citra Spot dan citra Google Earth diklasifikasikan menjadi beberapa penggunaan lahan yaitu semak dan belukar, tambak, tegalan/ladang, sungai, permukiman dan tempat kegiatan, kebun campuran, hutan, lahan terbuka, dan sawah.



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Eksisting 2019

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa Kota Palopo bagian utara, timur, dan

bagian selatan di dominasi oleh permukiman dan tempat kegiatan dan bagian barat di dominasi oleh hutan.



Gambar 3 Jenis Penggunaan Lahan dan Proporsi Tiap Penggunaan Lahan di Kota Palopo

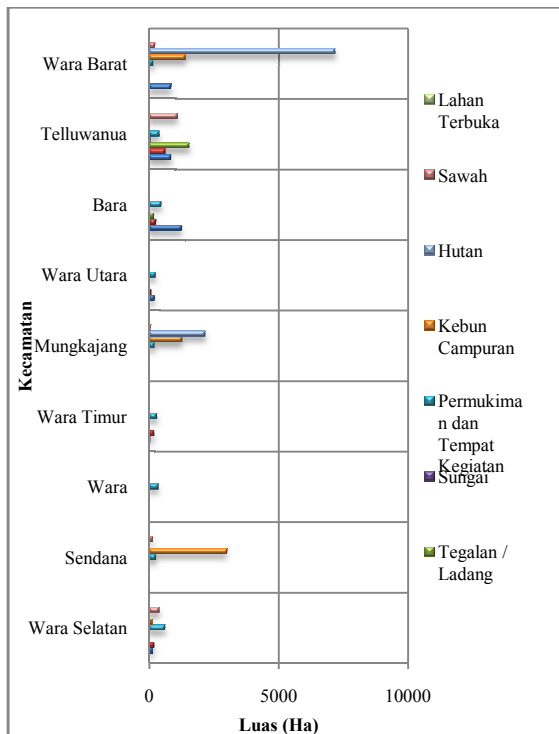
Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui penggunaan lahan hutan menjadi jenis penggunaan lahan yang paling besar seluas 9340,58 ha yaitu menempati 34,81 % dari luas wilayah Kota Palopo.

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kota Palopo 2019

No	Klas Penggunaan Lahan	Nama	Luas Ha	Luas %
1	Daerah Bukan Pertanian	Semak dan Belukar	3385,98	12,62
2	Perairan	Tambak	1370,22	5,11
3	Daerah Pertanian	Tegalan / Ladang	1792,75	6,68
4	Perairan	Sungai	109,04	0,41
5	Permukiman dan Daerah	Permukiman dan	3021,08	11,26
6	Buka Pertanian	Tempat Kegiatan	5871,22	21,88
7	Daerah Pertanian	Kebun Campuran	9340,58	34,81
8	Areal Penggunaan Lain	Hutan	1914,29	7,13
9	Daerah Pertanian	Sawah	25,20	0,09
9	Daerah Bukan Pertanian	Lahan Terbuka	25,20	0,09
Total			26830,36	100

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa semak dan belukar menempati luas 3385,98 ha, tambak seluas 1370,22 ha, tegalan/ladang seluas 1792,75 ha, sungai 109,04 ha, permukiman dan tempat kegiatan seluas 3021,08 ha, kebun campuran seluas 5871,22 ha, hutan seluas 9340,58 ha, sawah seluas 25,20 ha, dan lahan terbuka 1914,29 ha.



Gambar 4 Penggunaan Lahan Eksisting 2019 per Kecamatan

Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat penggunaan lahan eksisting per kecamatan. Diketahui Kecamatan Wara, Wara Utara dan Wara Timur merupakan daerah pusat kota dari Kota Palopo. Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan dengan hutan terluas di Kota Palopo.

Pola Ruang berdasarkan RTRW Kota Palopo 2012-2032

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud terdiri atas hutan lindung, RTH, kawasan konservasi, daerah resapan, dan kawasan lainnya. Kawasan budidaya yang dimaksud terdiri atas kawasan kesehatan, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, sawah, kawasan permukiman, dan kawasan lainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo tahun 2012-2032.

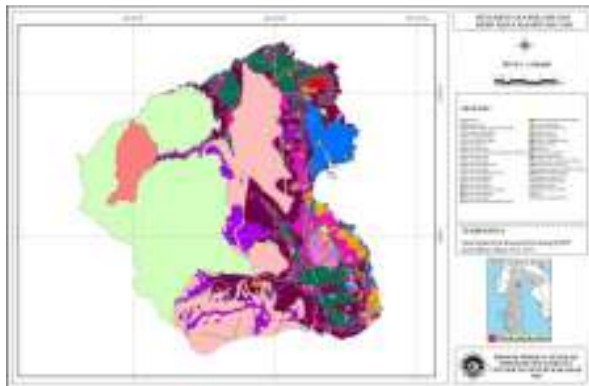
Tabel 2 Luas dan Proporsi Rencana Pola Ruang Kota Palopo Menurut RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012 – 2032		Luas	
No	Kawasan	Ha	%
1	Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	1,902	0,090
2	Pertanian Lahan Kering	2,021	15,585
3	Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	3,841	1,031
4	Kawasan Perumahan	4,373	5,420
5	Kawasan Pertambangan	9,527	4,559
6	Pertanian Lahan Basah	10,190	6,144
7	Kawasan Peribadatan	26,494	0,029
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa	30,598	0,358
9	Kawasan Industri	32,495	0,002
10	Kawasan Perkantoran	33,539	0,224
11	Pelayanan Umum	43,504	0,208
12	Kawasan Peternakan	47,428	0,219
13	Kawasan Pergudangan	54,790	0,102
14	Kawasan Peruntukan Industri (KIPA)	73,749	0,251
15	Tempat Pembuangan Akhir	81,010	0,043
16	Kawasan Rawan Bencana	111,849	0,080
Kawasan Budidaya		8915,595	34,345
17	Kawasan Hutan Lindung	8414,785	32,416
18	Kawasan Perlindungan Setempat	867,029	3,340
19	Sempadan Sungai	381,351	1,469
20	Hutan Kota	5141,482	19,806
21	Sub Pusat Pelayanan Kota	4,386	0,017
22	Sempadan Jaringan SUTET	18,809	0,072
23	Taman	57,438	0,221
24	Mangrove Sempadan Pantai	175,149	0,675
25	Hutan Mangrove	341,587	1,316
26	Lapangan Olahraga	23,206	0,089
27	Pemukaman	17,160	0,066
28	Kawasan Cagar Budaya	14,545	0,056
29	Sempadan Jaringan Jalur Pipa GAS Bumi	42,975	0,166
30	Sabuk Hijau Kawasan TPA	13,884	0,053
31	Sabuk Hijau Kawasan Industri Palopo	239,501	0,923
32	Sempadan Rel Kereta Api	65,957	0,254
33	Sempadan Jaringan SUTT	74,302	0,286
34	Jalur Hijau Lingkar Jalan Lingkar Timur	34,570	0,133
35	Jalur Hijau Lingkar Barat	53,805	0,207
Kawasan Lindung		15981,920	61,567
36	Kawasan Pelestarian Alam	972,502	3,746
37	Kawasan Pendidikan	65,140	0,251
38	Kawasan Pariwisata	5,634	0,022
39	Kompleks Militer	9,371	0,036
40	Kawasan Kesehatan	1,562	0,006
41	Kawasan Pelabuhan	6,875	0,026
Kawasan Peruntukan Lainnya		1061,085	4,088
Total		25958,600	100

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo (2012)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui kawasan pola pemanfaatan ruang di Kota Palopo di bagi menjadi kawasan budidaya, kawasan lindung, serta kawasan peruntukan lainnya. Kawasan budidaya memiliki luas 34,34%, kawasan lindung memiliki luas 61,57%, serta kawasan

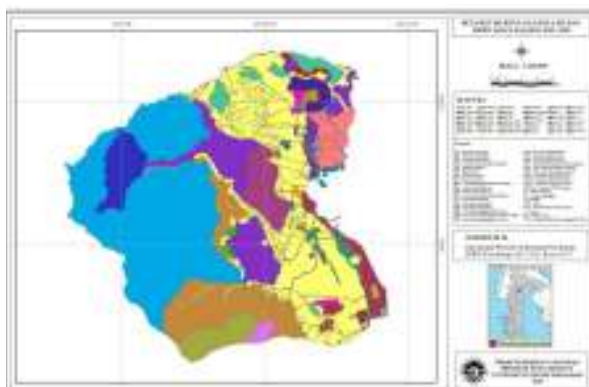
peruntukan lainnya memiliki luas 4,09% dari luas wilayah Kota Palopo.



Gambar 5 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Palopo 2012-2032

Berdasarkan Gambar 5 dapat di ketahui bahwa kawasan budidaya tersebar di bagian utara, bagian selatan dan dominan berada di bagian timur Kota Palopo. Kawasan lindung dominan berada di bagian barat dan juga tersebar seluruh wilayah di Kota Palopo. Sedangkan kawasan peruntukan lainnya tersebar di beberapa titik dan terluas berada di bagian barat yang berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam.

Rencana tata ruang wilayah memiliki masa berlaku 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo tahun 2012 – 2032 telah melakukan revisi I (pertama) dan saat ini telah berstatus masih dalam proses Perda.



Gambar 6 Peta Revisi Rencana Pola Ruang RTRW Kota Palopo 2012-2032

Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa kawasan lindung tersebar di beberapa bagian di wilayah Kota Palopo dan dominan berada di bagian barat wilayah Kota Palopo. Kawasan budidaya berada di bagian utara, bagian timur dan bagian selatan wilayah Kota Palopo.

Tabel 3 Luas dan Proporsi Rencana Pola Ruang Kota Palopo Menurut Revisi RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012 - 2032				Luas	
No	Kawasan		Ha	%	
1	Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Instalasi Pengelolaan Air Limbah	1,90	0,007	
2	Kawasan Kesehatan	Kawasan Kesehatan	2,02	0,007	
3	Kawasan Terminal Tipe C	Kawasan Terminal Tipe C	3,84	0,014	
4	Kawasan Mesjid Agung Palopo	Kawasan Mesjid Agung Palopo	4,37	0,016	
5	Kawasan Olahraga	Kawasan Olahraga	9,53	0,035	
6	Kawasan Sagu Teknopart	Kawasan Sagu Teknopart	10,19	0,037	
7	Kawasan Reklamasi	Kawasan Stasiun Kereta Api	26,49	0,097	
8	Rumah Sakit Umum Tipe A	Rumah Sakit Umum Tipe A	30,60	0,112	
9	Kawasan TPA Mancani	Kawasan TPA Mancani	32,50	0,119	
10	Kawasan Terminal Tipe A	Kawasan Terminal Tipe A	33,54	0,122	
11	Kawasan Reklamasi	Kawasan Permukiman	43,50	0,159	
12	Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran	47,43	0,173	
13	Kawasan Pendidikan	Kawasan Pendidikan	54,79	0,200	
14	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	73,75	0,269	
15	Kawasan Perumahan Terpadu	Kawasan Perumahan Terpadu	81,01	0,296	
16	Kawasan Pergudangan	Kawasan Pergudangan	111,85	0,408	
17	Kawasan Pengembalaan Sapi	Kawasan Pengembalaan Sapi	156,93	0,573	
18	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	289,70	1,057	
19	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	345,64	1,261	
20	Kawasan Reklamasi	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	576,08	2,102	
21	Sawah	Sawah	600,46	2,191	
22	Hutan Produksi	Hutan Produksi	705,75	2,575	
23	Kawasan Permukiman Transmigrasi	Kawasan Permukiman Transmigrasi	848,79	3,097	
24	Lahan Cadangan	Lahan Cadangan	1002,45	3,658	
25	Kebun Rakyat	Kebun Rakyat	2466,84	9,002	
26	Kawasan Penyangga Sumber Air Baku	Kawasan Penyangga Sumber Air Baku	2708,39	9,883	
27	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	6811,62	24,856	
Kawasan Budidaya			17079,96	62,33	
28	Taman Kota	Taman Kota	17,94	0,065	
29	Hutan Kota	Hutan Kota	81,71	0,298	
30	RTH	RTH	110,76	0,404	
31	Daerah Resapan	Daerah Resapan	116,21	0,424	
32	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	122,28	0,446	
33	Perairan	Perairan	122,48	0,447	
34	Daerah Perlindungan Setempat	Daerah Perlindungan Setempat	420,38	1,534	
35	Taman Wisata Alam Nanggala (TWA)	Taman Wisata Alam Nanggala (TWA)	969,44	3,538	
36	Hutan Lindung	Hutan Lindung	8362,93	30,517	
Kawasan Lindung			10324,12	37,674	
Total			27404,08	100	

Sumber : Bappeda Kota Palopo (2017)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui terdapat rencana untuk penambahan luasan

wilayah peruntukan untuk kawasan budidaya yaitu dengan melakukan reklamasi pantai Salemo seluas 646,07 Ha atau 2,36 % dari RTRW Kota Palopo. Kawasan pola pemanfaatan ruang di Kota Palopo di bagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya memiliki luas 62,33 % dan kawasan lindung memiliki luas 37,67 % dari luas wilayah Kota Palopo.

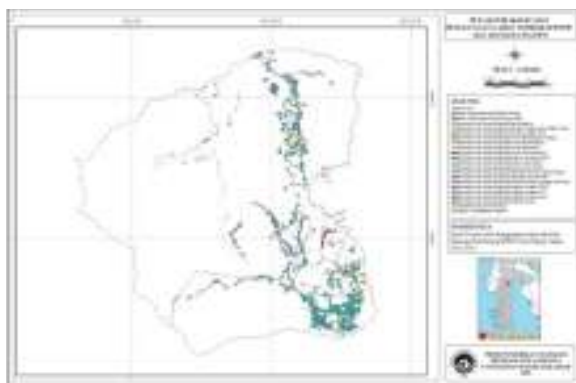
Kesesuaian Penggunaan Lahan dan Pola Ruang berdasarkan RTRW Kota Palopo 2012-2032

Tabel 4 Luas dan Proporsi Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang RTRW Tahun 2012-2032

No	Kesesuaian	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Konsisten I	19957,55	73,92
2	Konsisten II	5688,06	21,07
3	inkonsisten	1354,54	5,02
Total		27000,14	100

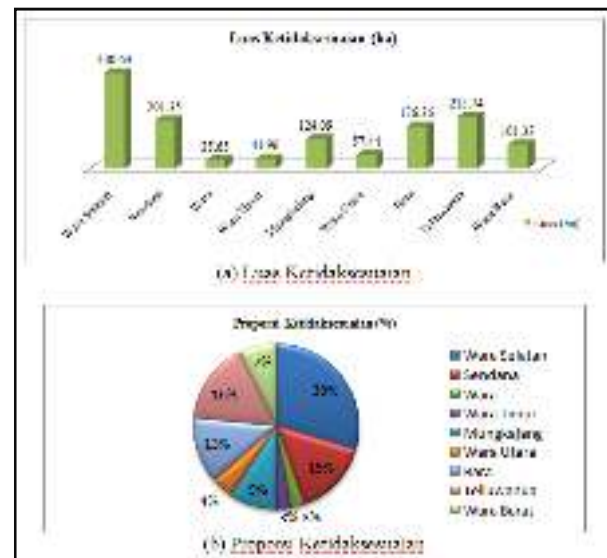
Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat secara umum, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang tahun 2012 – 2032 di Kota Palopo yaitu sebesar 1354,54 ha atau 5,02% dari total luas wilayah Kota Palopo. Sedangkan penggunaan lahan yang sesuai yaitu sebesar 25.645,61 ha atau 94,98% dari total luas wilayah walaupun.



Gambar 7 Peta Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan terhadap RTRW 2012-2032

Bentuk ketidaksesuaian terbesar di Kota Palopo yaitu peruntukan ruang untuk lahan kering di jadikan sebagai lahan terbangun untuk permukiman dan tempat kegiatan dengan luas 887,75 ha. Kemudian diikuti oleh kawasan lahan basah yang dimanfaatkan oleh permukiman dan tempat kegiatan dengan luas 178,80 ha.



Gambar 8 (a) Luas dan (b) Proporsi Ketidaksesuaian RTRW tahun 2012 - 2032 dengan Penggunaan Lahan Eksisting Tiap Kecamatan

Berdasarkan Gambar 8 dapat dilihat Kecamatan Wara Selatan merupakan kecamatan dengan luas ketidaksesuaian terluas yaitu 400,63 ha dengan bentuk ketidaksesuaian terbesar yaitu kawasan lahan kering yang penggunaan lahan eksistingnya merupakan permukiman dan tempat kegiatan.

Kawasan terbuka hijau yang mengalami ketidaksesuaian yaitu sempadan jaringan, sabuk hijau, jalur hijau, kawasan perlindungan setempat, mangrove sempadan pantai, hutan mangrove, sempadan rel kereta api dan sempadan pantai. Kawasan terbuka hijau yang mengalami ketidaksesuaian tersebar di setiap kecamatan di Kota Palopo dengan luas yaitu 209,46 ha. Kawasan hutan lindung yang

mengalami ketidaksesuaian terdapat di Kecamatan Mungkajang dengan luas 9,01 ha, Kecamatan Sendana dengan luas 0,05 ha, dan Kecamatan Wara Barat dengan luas 15,90 ha.

Kawasan peruntukan lainnya peruntukan kawasan perlindungan alam juga mengalami ketidaksesuaian dengan penggunaan lahan eksisting kebun campuran terdapat di Kecamatan Wara Barat sebesar 0,02 ha.

Tabel 5 Luas dan Proporsi Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Revisi Pola Ruang RTRW Tahun 2012-2032

No	Kesesuaian	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Konsisten I	15860,37	57,88
2	Konsisten II	11329,72	41,35
3	inkonsisten	210,44	0,77
Total		27400,53	100

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

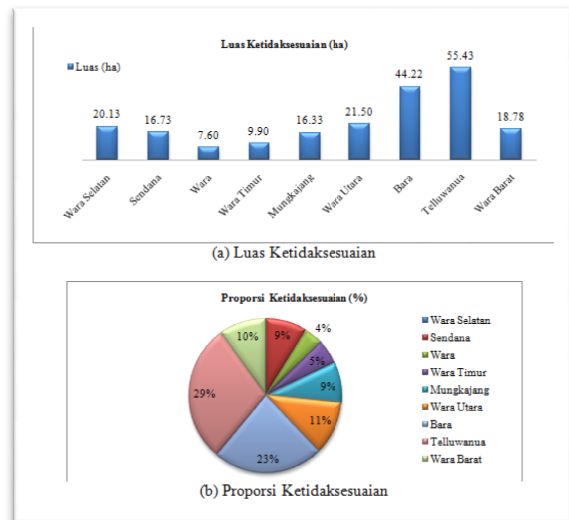
Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat secara umum, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang di Kota Palopo yaitu sebesar 210, 62 ha atau 0,77% dari luas wilayah Kota Palopo.



Gambar 9 Peta Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan terhadap Revisi RTRW 2012-2032

Daerah perlindungan setempat di manfaatkan sebagai penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan mendominasi ketidaksesuaian di Kota Palopo dengan luas 185,96 %. Kemudian diikuti oleh perairan yang

di manfaatkan sebagai penggunaan lahan tegalan ladang dengan luas 8,72 ha.



Gambar 10 (a) Luas dan (b) Proporsi Ketidaksesuaian Revisi RTRW tahun 2012-2032 dengan Penggunaan Lahan Eksisting Tiap Kecamatan

Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat Kecamatan Talluwanea merupakan kecamatan dengan ketidaksesuaian terluas yaitu 55,43 ha dengan bentuk ketidaksesuaian terbesar yaitu daerah perlindungan setempat yang penggunaan lahan eksistingnya merupakan permukiman dan tempat kegiatan dengan luas 42,29 ha. Kecamatan dengan ketidaksesuaian terendah yaitu Kecamatan Wara dengan luas 7,60 ha dengan bentuk ketidaksesuaian terbesar yaitu daerah perlindungan setempat yang penggunaan lahan eksistingnya merupakan permukiman dan tempat kegiatan.

Daerah perlindungan setempat merupakan kawasan lindung yang terbesar ketidaksesuaiannya yaitu dengan luas 185,98 ha yang dimanfaatkan sebagai permukiman dan tempat kegiatan . Ketidaksesuaian terbesar kedua yaitu perairan yang dimanfaatkan sebagai tegalan/ladang seluas 8,72 ha. Perairan, daerah

resapan dan hutan lindung juga dimanfaatkan sebagai permukiman dan tempat kegiatan. Meskipun ketidaksesuaian yang terjadi masih tergolong rendah namun ketidaksesuaian tersebut dikhawatirkan akan mengancam kelestarian ekosistem sekitar.

PEMBAHASAN

Penggunaan lahan di Kota Palopo berasal dari interpretasi citra Spot dan citra *Google Earth* diklasifikasikan menjadi beberapa penggunaan lahan yaitu semak dan belukar, tambak, tegalan / ladang, sungai, permukiman dan tempat kegiatan, kebun campuran, hutan, lahan terbuka, dan sawah.

Bappeda (2017), menunjukkan bahwa penggunaan lahan pada tahun 2017 Kota Palopo yang di klasifikasikan menjadi 5 (lima) kelas penutupan lahan yaitu areal penggunaan lain memiliki luas 5647,86 ha, daerah bukan pertanian seluas 13729,1 ha, daerah pertanian seluas 3698,94 ha, perairan seluas 953,55 ha, dan kelas penutupan lahan permukiman dan tempat kegiatan seluas 2893,45 ha.

Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kota Palopo diarahkan untuk mengendalikan alih fungsi bangunan dan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta mendorong agar perkembangan kawasan budidaya dapat sesuai dengan rencana pola ruang. Secara umum, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang tahun 2012 – 2032 di Kota Palopo yaitu sebesar 1354,54 ha atau 5,02% dari total luas wilayah Kota Palopo. Ketidaksesuaian ini masih tergolong relative rendah karena diperkirakan ketidaksesuaian setiap tahunnya yaitu sebesar

0,72% selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2012-2019. Diperkirakan ketidaksesuaian dari tahun 2012-2032 yaitu sebesar 14,2%.

Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh alih fungsi kawasan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Ketidaksesuaian penggunaan lahan dan rencana pola ruang di dominasi oleh penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan alokasi yang telah ditetapkan.

Bentuk ketidaksesuaian terbesar di Kota Palopo yaitu peruntukan ruang untuk lahan kering dijadikan sebagai lahan terbangun untuk permukiman dan tempat kegiatan. Kemudian diikuti oleh kawasan lahan basah yang dimanfaatkan oleh permukiman dan tempat kegiatan. Kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering secara eksisting merupakan lahan yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pembuatan perumahan. Dapat dilihat dari luasan sawah dan sawah tadah hujan berdasarkan data Bappeda (2017) yaitu seluas 1926,96 ha dan data eksisting 2019 sawah seluas 1914,29 ha. Wilayah yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan yaitu penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian (Rusdi, 2017).

Penjauan ini merupakan revisi I (pertama) dari RTRW sebelumnya yaitu rencana tata ruang wilayah Kota Palopo tahun 2012 – 2032 yang telah Perda no. 9 tahun 2012. Revisi RTRW saat ini masih dalam proses perda. Secara umum, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang di Kota Palopo yaitu sebesar 210, 62 ha atau 0,77% dari luas wilayah Kota Palopo.

Pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai rencana tata ruang dapat menyebabkan

orang tidak menyadari bahwa telah menempati dan membangun pada tempat yang salah atau tidak sesuai. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah pada masyarakat tentang RTRW menyebabkan masyarakat tidak mengetahui rencana apa yang akan dibangun di lokasi tempat tinggalnya (Khaerani, 2017).

Alih fungsi penggunaan lahan memiliki dampak terhadap lingkungan fisik dan sosial. Potensi dampak yang dapat ditimbulkan ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap penerapan pola ruang di Kota Palopo yaitu terjadi konflik pemanfaatan lahan dan terlampaunya daya dukung dan daya tampung lahan, serta dapat berdampak terhadap lingkungan di Kota Palopo seperti terjadi longsor dan banjir di beberapa wilayah. Daerah hutan dan perkebunan di wilayah Kota Palopo banyak yang berubah menjadi perumahan yang menimbulkan pengikisan tanah atau longsor karena tempat-tempat yang awalnya berupa tempat resapan air kini berubah menjadi tempat-tempat pembangunan. Hal tersebut juga menyebabkan rusaknya hutan dan tebing di daerah pegunungan mengalami longsor.

Basri dkk (2013) mengatakan dampak dari alih fungsi lahan yang menyebabkan semakin berkurangnya luas hutan disuatu wilayah dapat meningkatkan nilai koefisien limpasan yang menjadi pemicu sering terjadinya banjir di bagian hilir.

Dampak negatif alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu akan memberikan dampak yang serius terhadap kerawanan pangan, menimbulkan pengangguran di bidang pertanian, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup (Faisal, 2015). Ada beberapa bagian dari

permukiman yang memiliki beban lingkungan yang tinggi sehingga menimbulkan pencemaran seperti pembuangan sampah, genangan air selokan, serta kebersihan lingkungan permukiman kurang indah. Dampak tersebut tampak jelas jika musim penghujan datang yang biasanya disertai dengan banjir (Badrun, 2006). Menurut PERDA No. 11 (2013), terdapat beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat konversi lahan kawasan lindung ke kawasan budidaya, yaitu Konversi lahan dari lahan peruntukan fungsi lindung ke lahan peruntukan budidaya seperti industri, pertanian, perkebunan, dan lainnya, akan menimbulkan dampak negatif bagi fungsi hidroorologis hutan. Perubahan komposisi tutupan vegetasi hutan dapat menyebabkan kerusakan siklus air.

Akibatnya pada musim penghujan apabila curah hujan tinggi akan mengakibatkan banjir, sedangkan pada musim kemarau ketika curah hujan sangat rendah akan terjadi kekeringan. Erosi dan sedimentasi juga dapat terjadi. Ketersediaan air tanah juga turut terpengaruh akibat terganggunya keseimbangan fungsi ekologis hutan. Kondisi demikian banyak terjadi di Kota Palopo seiring dengan perkembangannya.

Solusi yang diterapkan dalam ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Palopo yaitu :

- 1) Dilakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk mengkaji seberapa besar ketidaksesuaian yang terjadi dengan RTRW.
- 2) Penghentian kegiatan yang melanggar RTRW.

- 3) Diberlakukannya disinsentif berdasarkan Perda no. 9 tahun 2012.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan lahan eksisting di Kota Palopo terdiri dari sembilan jenis yaitu permukiman dan tempat kegiatan, tambak, sungai, lahan terbuka, sawah, tegalan/ladang, semak belukar, kebun campuran, dan hutan.
2. Penggunaan lahan eksisting di Kota Palopo terdiri dari sembilan jenis yaitu permukiman dan tempat kegiatan, tambak, sungai, lahan terbuka, sawah, tegalan/ladang, semak belukar, kebun campuran, dan hutan.
3. Ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah sulit dihindari. Penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Palopo masih relatif tergolong rendah. Kota Palopo telah menerapkan Rencana Tata Ruang Wilayahnya dengan baik. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW 2012 – 2032 yaitu sebesar 1254,54 ha atau 5,02% dari luas wilayah Kota Palopo dalam kurun waktu tujuh tahun dari tahun 2012-2019 atau sekitar 0,72% per tahunnya. Jika diperkirakan ketidaksesuaian dari tahun 2012-2032 yaitu sebesar 14,2%. Sedangkan ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting 2019 dengan revisi RTRW 2012 – 2032 yang dilakukan pada tahun 2017 masih terdapat ketidaksesuaian sebesar 210,44 ha atau 0,77 % dari luas wilayah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang diusulkan sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait sesuaian penggunaan lahan eksisting dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo dan kualitas perpetaan perlu dilengkapi.
2. Kota Palopo harus mempertahankan kekonsistennya dalam menerapkan RTRW karena penerapannya sudah cukup baik. Namun, tetap harus meningkatkan monitoring terhadap penggunaan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang RTRW juga harus ditingkatkan.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang harus lebih ditingkatkan untuk memperkecil potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2018. *Kota Palopo dalam Angka 2018*. Palopo : Badan Pusat Statistik Kota Palopo
- Gunawan, A. , INS Jaya, dan M.B. Saleh. 2010. Quick Tecniques in Indentifying Open Area by the Use of Multi Spatial and Multidate Imageries. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 16(2):63-72.
- Iskandar. F., Awaluddin M., dan Yuwono.B.D., 2016. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, Vol 5 (1).
- Khaerani, R. 2017. Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Maulana, I. 2018. Analisis Faktor Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2015 dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan

- Jauh. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurfalaq, A. 2017. Kajian Zona Arah Penggunaan Lahan Daerah Mungkajang, Kota Palopo. *Lomba Karya Tulis Ilmiah 50 tahun Universitas Cokroaminotopo Palopo Gedung E Kampus I UNCP*, 22 Februari 2017, 24.
- Penataan Ruang. 2018. *Penentuan Teknik Tata Ruang*. Jakarta: Indonesia Institute for Infrastructure Studies. www.penataanruang.com
- PERDA No.9. 2012. *Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012-2032*. Sekretariat Daerah. Kota Palopo.
- Purnamasari, A. 2015. Analisis Keterkaitan Penggunaan Lahan Rencana Pola Ruang dan Hirarki Wilayah di Kota Cilegon. *Skripsi*. Fakultas Pertanian, ITB.
- Regmi, R. R., Saha, S. K., & Subedi, D. S. 2017. Geospatial Analysis of Land Use Land Cover Change Modeling in Phewa Lake Watershed of Nepal by Using GEOMOD Model. *Himalayan Physics*, 6, 65.
- Rusdi, M., Sahputra, D., & Sugianto, S. 2017. Analisis Penggunaan Lahan Permukiman Di Kawasan Peri Urban Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal*. Vol 12.
- Sembel, D. T. 2010. *Pengendalian Hayati*. Yogyakarta : Andi
- Sunardi. 2004. *Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota*. Bahan Diskusi Workshop dan Temu Alumni MPKD UGM, Yogyakarta.
- Tuni, M. S. 2013. Perencanaan Penggunaan Lahan Pascatambang Nikel untuk Mendukung Pengembangan Wilayah di Kabupaten Halmahera Timur. *Tesis*. Program Studi Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- UU No.26 . 2007. *Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wijaya, N. 2015. Deteksi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Citra Landsat dan Sistem Informasi Geografis: Studi Kasus di Wilayah Metropolitan Bandung, Indonesia. *Geoplaning : Journal of Geomatics and Planning*, 2(2).